

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia merupakan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mencakup kebutuhan material, spiritual, dan sosial. Adanya ketimpangan pembangunan dan pendidikan di berbagai wilayah di Indonesia, upaya pemerataan pembangunan, mengurangi kesenjangan antardaerah, pendapatan, dan kemiskinan di setiap daerah di Indonesia dilakukan dengan mengembangkan sistem pemerintahan desentralisasi dan memberikan kesempatan lebih besar pada daerah otonom untuk mengelola dan mengembangkan daerahnya masing-masing.

Tiap pemerintahan daerah di seluruh Indonesia mempunyai beberapa kebijakan dan ketentuan yang disesuaikan dengan kondisi perekonomian yang terjadi secara nasional. Selain itu, pemanfaatan keunggulan masing-masing daerah juga harus dioptimalkan dengan baik oleh pemerintah daerah guna meminimalisir ketergantungan penggunaan dana anggaran dari pusat. Pendapatan Asli Daerah (PAD) seperti retribusi daerah, pajak daerah, dan lain-lain, adalah sumber keuangan daerah yang dapat membantu mengurangi ketergantungan pada dana dari pemerintah pusat. Perencanaan dan realisasi anggaran dari sumber keuangan yang telah disebutkan membuat pemerintah daerah dapat mengoptimalkan dan mengetahui bagaimana pendapatan yang didapatkan secara mandiri dapat membantu pembangunan dan memberikan masyarakat pelayanan yang terbaik di berbagai sektor (Kasih dan Sulistyowati, 2022).

Namun, adanya *pandemic covid-19* yang melanda seluruh dunia, termasuk Indonesia membuat pertumbuhan ekonomi yang bergerak di dalam negara menjadi terganggu. Pandemi yang terjadi pada kuartal pertama 2020 membuat seluruh sektor perekonomian di seluruh daerah Indonesia mengalami kontraksi yang cukup tinggi. Sektor pendapatan dan belanja pemerintah daerah tentunya mengalami penurunan yang cukup signifikan (Wardani dan Trisnaningsih, 2022).

Provinsi Bali dalam Angka (2020) yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Bali menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Produk Domestik Bruto (PDB) dalam sektor akomodasi dan transportasi mengalami penurunan yang sangat signifikan di angka -33,99% dan - 24,9%. Angka pengangguran juga tentunya melonjak pada 2020 sebanyak 144.500 jiwa semenjak Provinsi Bali mulai terdampak *Pandemic Covid-19* (Provinsi Bali dalam Angka, 2020). Angka tersebut diperkirakan 268% lebih besar jika dibandingkan dengan tahun 2019. Hal yang sama juga terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Barat, di mana pada Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam Angka (2020) disebutkan bahwa tingkat pengangguran karena *pandemic Covid-19* sebesar 28,39 ribu jiwa atau lebih besar 25,04% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Provinsi Bali yang merupakan salah satu daerah di Indonesia yang memiliki keunggulan di bidang pariwisata dan sumber daya alam yang indah hingga terkenal secara internasional juga mengalami kontraksi tersebut. Statistik Keuangan Pemerintah Kota atau Kabupaten Provinsi Bali yang didapatkan melalui Badan Pusat Statistik (2022) memberikan informasi keuangan bahwa pendapatan dan

belanja pemerintah daerah di Provinsi Bali mengalami penurunan yang signifikan pada tahun pertama terjadinya pandemi.

Sumber: BPS Provinsi Bali, 2022

Pada data yang didapatkan oleh data BPS (Provinsi Bali dalam Angka 2021, dapat dilihat penerimaan APBD pada seluruh kota/kabupaten Provinsi Bali mengalami penurunan terutama pada periode 2019 dan 2020. Hal ini memperjelas bahwa adanya pandemi *covid-19* yang sedang melanda seluruh daerah di Indonesia memengaruhi APBD Provinsi Bali. Pada periode anggaran 2021, hanya Kabupaten Tabanan yang mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan periode anggaran 2020. Peningkatan tersebut dapat terjadi karena pemerintahan daerah Kabupaten Tabanan mampu merealisasikan peraturan daerah dan menyesuaikan perda yang ada dengan kondisi pandemi.

Pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bali masih negatif pada tahun 2021 yang berada pada angka 2,47 persen. Bahkan, realisasi pendapatan dan belanja Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Bali pada tahun tersebut lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pendapatan total Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Bali pada tahun 2021 mencapai 14,94 triliun rupiah, mengalami penurunan sebesar 7,96 persen dibandingkan dengan tahun 2020. Sementara itu, belanja total Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Bali pada tahun 2021 mencapai 15,21 triliun rupiah, mengalami penurunan sebesar 6,66 persen dibandingkan dengan tahun 2020. Kemampuan dalam menghasilkan PAD

Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Bali pada tahun 2021 juga menurun sebesar 2,88 persen.

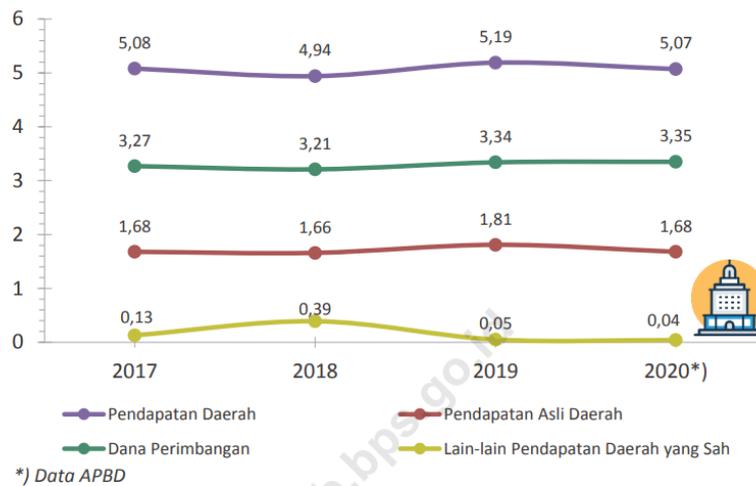
Tabel 1.01 Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota/Kabupaten Provinsi Bali Periode 2019-2021

Kabupaten/Kota	Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota di Provinsi Bali (Ribu Rupiah)		
	2021	2020	2019
Kab. Jembrana	185 004 035	148 045 103	133 698 784
Kab. Tabanan	362 314 631	313 042 530	354 558 239
Kab. Badung	1 750 345 226	2 116 974 302	4 835 188 460
Kab. Gianyar	430 172 109	545 869 873	997 478 368
Kab. Klungkung	254 494 496	220 893 875	225 063 772
Kab. Bangli	163 537 096	104 325 150	127 040 436
Kab. Karangasem	252 688 747	219 176 733	233 013 033
Kab. Buleleng	391 988 445	318 986 891	365 595 301
Kota Denpasar	792 362 414	731 261 281	1 010 779 481
Provinsi Bali	3 117 070 009	3 069 474 218	4 023 156 316

Sumber: BPS Provinsi Bali 2022

Pada gambar diatas, menurut data dari Provinsi Bali dalam Angka (2021), dapat dilihat bahwa terjadi penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagian besar kota/kabupaten di Provinsi Bali pada periode anggaran 2019 dan 2020 seperti Kab. Jembrana, Tabanan, Badung, Gianyar, Klungkung, Bangli, Karangasem, Buleleng, dan Denpasar. Berdasarkan nominal selisih antara hasil PAD dari tahun 2019 hingga 2020, penurunan tersebut terlihat cukup signifikan. Hal ini dikarenakan pada 2020 merupakan tahun pertama *pandemic covid-19* melanda Indonesia. Pada tahun 2021, total PAD di beberapa kota/kabupaten juga cukup rendah jika dibandingkan dengan tahun anggaran 2019 dimana *pandemic* masih belum terjadi. Namun, beberapa kota/kabupaten mengalami peningkatan PAD di

tahun 2021 jika dibandingkan dengan tahun 2020, hal ini dikarenakan pemerintah daerah yang mulai menyusun kebijakan baru dalam menangani penerimaan PAD selama *pandemic* sedang terjadi.



Gambar 1.1 Grafik Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat 2018-2021

Sumber: BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2022

Data Realisasi Pendapatan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat selama tahun 2019 dan 2020 yang didapatkan dari Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (2022) mengalami sedikit penurunan. Hal ini dapat dikaitkan dengan adanya efek *pandemic Covid-19* yang melanda seluruh daerah di Indonesia. Namun, pada tahun 2021, pendapatan daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat terjadi peningkatan sebesar 2,95 persen yakni dari 5,17 triliun rupiah di tahun 2020 menjadi 5,33 triliun rupiah di tahun 2021. Pendapatan asli daerah yang merupakan salah satu sumber pendapatan daerah di Provinsi NTB sendiri berkontribusi sebesar 35,45% dibandingkan dengan sumber pendapatan

lainnya. Selama tahun 2021, kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbesar masih didominasi dari perolehan pajak mencapai 75,10 persen dan pendapatan lainnya sebesar 21,90 persen. Sementara itu, kontribusi dari retribusi dan hasil perusahaan daerah serta pengelolaannya belum mampu menggerakkan potensi pendapatan daerah secara signifikan.

Penjelasan di atas merupakan bukti bahwa seluruh pemerintah daerah Provinsi Bali sangat merasakan dampak dari pandemic *Covid-19* dalam bidang pendapatan daerah. Beberapa faktor yang memengaruhi penurunan pendapatan dan belanja seluruh pemerintah daerah Provinsi Bali dan Nusa Tenggara Barat adalah terhambatnya kegiatan pariwisata yang merupakan keunggulan dari daerah Bali dan NTB dikarenakan adanya pembatasan kerumunan dan kebijakan PPKM yang membuat wisatawan dari mancanegara maupun domestik tidak dapat melakukan kegiatan pariwisata. Selain itu, adanya pembatasan aktivitas ekonomi secara nasional sebagai langkah pencegahan penularan virus juga menyebabkan perlambatan kegiatan ekonomi secara keseluruhan. Di samping itu, pemerintah juga perlu mengeluarkan anggaran untuk mengatasi penyebaran pandemi.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Farianti (2020), hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak daerah memiliki pengaruh positif signifikan terhadap pendapatan asli daerah di Kota Magelang pada periode pengamatan 2014-2018 sebesar 3,05%. Kontribusi retribusi daerah hanya memiliki pengaruh sekitar 0,18%, sehingga dapat dikatakan bahwa retribusi daerah tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah di Kota Magelang. Pajak daerah dan

retribusi daerah bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan asli daerah di Kota Magelang sebesar 70,42% per tahun.

Penelitian yang dilakukan oleh Kasih dan Sulistyowati (2022) memiliki hasil penelitian yang berbeda, dimana pajak daerah dan retribusi daerah memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan terhadap pendapatan asli daerah Kota Surabaya. Hasil yang sama juga didapatkan pada penelitian yang dilakukan oleh (Lianda dkk., 2021) bahwa secara parsial, variabel Pajak Daerah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi, sedangkan Retribusi Daerah juga memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

Penelitian yang dilakukan oleh Gheta (2020) juga memiliki hasil yang berbeda, dimana Rata-rata kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Sikka dari tahun 2013-2017 (5 tahun) sebesar 14,27%. Hasil ini menunjukkan bahwa tingkat Kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Sikka dari tahun 2013-2017 masuk dalam kriteria kurang berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah.

Kesimpulan yang bisa didapatkan dari penelitian terdahulu tersebut adalah pada topik yang diambil dari peneliti tentang pengaruh efektivitas dan kontribusi retribusi daerah dan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah, terdapat beberapa perbedaan hasil analisis yang didapatkan dari setiap peneliti. Hal ini diakibatkan oleh beberapa faktor, seperti: penetapan peraturan daerah di tiap pemerintah kota atau kabupaten, kesadaran masyarakat di tiap kota/kabupaten yang

berbeda-beda, kinerja pemerintah kota/kabupaten dalam pengelolaan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah, dst.

Oleh karena itu, peneliti mengambil judul “PENGARUH RETRIBUSI DAERAH DAN PAJAK DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH PROVINSI BALI DAN NUSA TENGGARA BARAT PERIODE 2019-2021” dengan tujuan untuk mengetahui seberapa besar tingkat efektivitas dan kontribusi dari pajak daerah serta retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah seluruh kota/kabupaten di Provinsi Bali dan Nusa Tenggara Barat selama tahun anggaran 2019-2021, dimana pada periode tersebut, seluruh daerah di Indonesia mengalami penurunan dalam pertumbuhan perekonomian. Provinsi Bali yang dikenal akan kekayaan sumber daya alam dan keindahan pariwisatanya yang digunakan sebagai pemasukan daerah tentu sangat merasakan dampak dari adanya pemberlakuan kebijakan mengenai pandemi *covid-19*. Selain itu, hasil dari penelitian ini dapat digunakan oleh pemerintah daerah dalam mengevaluasi kinerja dari kebijakan pemerintah daerah terkait penetapan anggaran daerah dan pengelolaannya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah tingkat efektivitas penerimaan hasil masing-masing retribusi daerah seluruh kota/kabupaten di Provinsi Bali dan NTB berpengaruh terhadap PAD tahun 2019-2021?

2. Apakah tingkat efektivitas penerimaan hasil masing-masing pajak daerah seluruh kota/kabupaten di Provinsi Bali dan NTB berpengaruh terhadap PAD tahun 2019-2021
3. Apakah tingkat kontribusi masing-masing retribusi daerah seluruh kota/kabupaten di Provinsi Bali dan NTB berpengaruh terhadap PAD tahun 2019-2021?
4. Apakah tingkat kontribusi pajak daerah seluruh kota/kabupaten di Provinsi Bali dan NTB berpengaruh terhadap PAD tahun 2019-2021?
5. Apakah tingkat efektivitas dan kontribusi masing-masing retribusi daerah dan pajak daerah berpengaruh terhadap PAD tahun 2019-2021?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka penulis menentukan tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh efektivitas penerimaan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah pada seluruh kota/kabupaten Provinsi Bali dan NTB.
2. Untuk mengetahui pengaruh efektivitas penerimaan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah pada seluruh kota/kabupaten Provinsi Bali dan NTB.
3. Untuk mengetahui tingkat kontribusi penerimaan retribusi dan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah pada seluruh kota/kabupaten Provinsi Bali dan NTB.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitaian diatas, maka penulis menentukan manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai pengaruh efektivitas dan kontribusi retribusi daerah dan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah suatu pemerintah daerah serta kesinambungan mengenai realisasi anggaran pendapatan terhadap teori *stakeholder* yang digunakan oleh peneliti.

2. Secara praktis

- a. Bagi Penulis,

Penelitian ini diharapkan untuk dapat memberikan kontribusi berupa pengalaman dalam meneliti suatu fenomena mengenai pengaruh permasalahan *pandemic Covid-19* serta memberikan perbandingan terhadap efektivitas dan kontribusi retribusi daerah dan pajak daerah yang merupakan sumber pendapatan asli daerah suatu pemerintahan daerah dan membantu mengembangkan informasi terkait pembahasan anggaran pemerintah daerah.

- b. Bagi Akademisi,

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu pihak akademisi mendapatkan referensi dan sumber untuk penelitian selanjutnya serta memperluas jaringan penelitian di lingkup akademis untuk kedepannya digunakan kembali.

c. Bagi Instansi

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi kepada pihak instansi yang terkait yaitu pemerintah daerah kota/kabupaten Provinsi Bali dan NTB agar bisa mengevaluasi kinerja dalam pengelolaan keuangan daerah dan penentuan kebijakan peraturan daerah terkait pengelolaan anggaran tersebut.